

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Norma menjadi tata aturan yang harus di patuhi dalam masyarakat, dimana sebagai suatu ukuran dan patokan bagi seseorang dalam bertingkah laku, namun pada dewasa ini sering terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan norma, ketidak berdayaan (*empowerless*) masyarakat sering diasumsikan berkaitan erat dengan persoalan kemiskinan, keterbelakangan, kebutuhan mendesak dan kekurangan kapasitas pendidikan yang berujung pada tindakan kriminalitas., Kriminalitas atau tindak kriminal adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang yang melanggar hukum pidana. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana. Hal ini di ikuti dengan perkembangan hukum yang mengikuti kebutuhan manusia untuk memenuhi tujuan nasional, tidak terkecuali proses pembinaan bagi narapidana di lembaga Permasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan system pembinaan serta sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Pada pasal angka 2 dan 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab dan Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab “.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. merupakan himpunan dari norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di kehidupan masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan. Menurut Sudarto : Istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan ”resosialisasi” dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaanya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatannya dan dalam penyelenggaraannya, mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta pidanaanya

yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan narapidana pada waktu lepas dari lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik. Dengan demikian sistem pemasyarakatan dapat diartikan suatu cara perlakuan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan khususnya pidana penjara dengan mendidik, membimbing dan mengarahkan narapidana, sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara serta tidak melakukan kejahatan lagi.

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di perlukan suatu pemberdayaan untuk memperoleh perubahan yang lebih baik dan bermanfaat. Program seperti ini secara umum berkonsentrasi pada pengembangan ketrampilan dan perilaku, bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.

Parsons (1994) dalam buku Totok Mardianto (2017: 29) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan

bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Pertama secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya. Kedua pengertian tentang masyarakat, menurut Soetomo (2011 : 25) masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi.

Dari kedua definisi tersebut bila digabungkan dapat dipahami makna pemberdayaan masyarakat. Namun sebelum kita tarik kesimpulan, terlebih dahulu kita pahami makna pemberdayaan masyarakat menurut para ahli. Menurut Moh. Ali Aziz, dkk (2005 : 136) : “Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses”.

Secara konseptual. Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut Subejo dan Supriyanto (2005) dalam buku Totok Mardikanto (2017: 46) Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu eksternal factor dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim berlaku secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat mampu melanjutkan secara mandiri.

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijino dan Pranaka (1996) dalam buku Totok Mardikanto (2017: 51), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuannya keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya.

Mengacu pada pengertian dan teori para ahli di atas, dalam penelitian ini pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga masyarakat dapat mencapai kemandirian. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, perlindungan dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan

potensinya melalui tim pemberdayaan sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia memiliki Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan sebanyak 477 yang tersebar di seluruh wilayah dan ada 24 lapas dan 20 rutan yang tersebar di wilayah Jawa Tengah. Kota Semarang menjadi satu-satunya lokasi penempatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di seluruh wilayah Jawa Tengah, bagi pelaku tindakan kriminalitas. Kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan (pelanggaran yang dapat dihukum) yaitu perkara kejahatan yang dapat dihukum. Menurut Undang-Undang, kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Tingkat kriminalitas di wilayah Jawa Tengah sendiri dapat dilihat dengan semakin besarnya jumlah tahanan / narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan. Pada perumusan ini peneliti lebih berfokus pada kejahatan atau kriminalitas yang dilakukan orang wanita dikarenakan jumlah lapas wanita di Jawa Tengah hanya ada satu serta perbandingan jumlah wanita: 17. 269 772 lebih banyak dibandingkan laki-laki: 16 988 093 menurut Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2017). Tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh wanita dapat di lihat dari jumlah tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang, sebagai berikut ini:

Tabel 1.1

Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

Tahanan	Narapidana	Total	Created Date
41	302	343	7-01-2019

Sumber; Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Kota Semarang

Data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kriminalitas mempunyai angka yang cukup tinggi. Jumlah keseluruhan tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Semarang pada Januari tahun 2019 yang mencapai 343 terpidana.

Sistem Pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik diperlukannya suatu proses pembinaan. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan khususnya pada pasal 3 bahwa “ narapidana wajib mendapatkan pemberdayaan dalam pembinaan dan pembimbingan berupa ketrampilan kerja dan latihan kerja”

Bimbingan sebagai bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu untuk menghindari atau mengatasi kesulitan kesulitan dalam hidupnya sehingga individu itu dapat mencapai kesejahteraannya. Bimbingan ini juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan bimbingan yang terencana, terorganisasi, terkoordinasi. Menurut Marsudi (2003:113) bimbingan sebagai bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu untuk menghindari atau mengatasi kesulitan kesulitan dalam hidupnya sehingga individu itu dapat mencapai kesejahteraannya. Bimbingan kerja adalah suatu perangkat, lebih tepatnya suatu program yang sistematis, proses, teknik, atau layanan yang

dimaksudkan untuk membantu individu memahami dan berbuat atas dasar pengenalan diri dan pengenalan kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan, pendidikan, dan waktu luang, serta mengembangkan ketrampilan-ketrampilan mengambil keputusan sehingga yang bersangkutan dapat menciptakan dan mengelola perkembangan karirnya.

Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Bimbingan karir/pekerjaan merupakan suatu proses pembantuan atau pembentukan terhadap individu untuk menumbuhkan dan menerima segala bentuk ketrampilan yang diberikan guna untuk mengarahkan kemampuan masyarakat agar lebih terarah.

Berbagai upaya dalam meminimalisir tingkat kriminalitas khususnya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang . Hal ini ditunjukkan dari beberapa kegiatan yang dikembangkan oleh para narapidana dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan sebagai fasilitator dimana terjadi pembimbingan terhadap narapidana menjadi lebih terberdaya dan terarah didalam menuju kehidupan yang sejahtera.

Pembimbingan ini berupa program-program pemberdayaan yang terencana untuk memperoleh perubahan yang lebih baik dan bermanfaat. Program ini secara umum berkonsentrasi pada pengembangan ketrampilan dan perilaku narapida. Beberapa kegiatan dibidang ketrampilan dalam bimbingan kerja dilakukan untuk pembekalan kemampuan atau potensi yang di miliki narapidana agar dapat di kembangkan dengan baik. Kegiatan bimbingan kerja ini bertujuan untuk mengolah kemampuan yang dimiliki oleh Narapidan. Kegiatan pelatihan sangat penting karena bermanfaat guna

menambah pengetahuan atau ketrampilan terutama bagi yang mempersiapkan diri memasuki lapangan pekerjaan. Agar kemampuan serta kapabilitas kita selalu terjaga guna mengamankan existensi atau peningkatan karir

Menurut pasal I ayat 9 undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dimana pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.

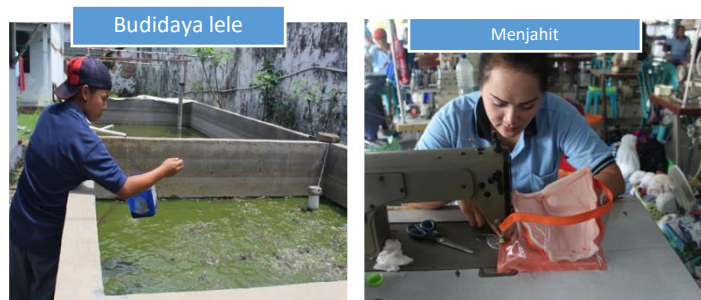
Sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah dengan pedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2015-2019. Pembinaan Narapidana Profesional Penegakan Hukum dan HAM Pemasyarakatan yang professional adalah:

1. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi
2. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran Penegakan Hukum dan HAM terkait pemasyarakatan yang dimaksud: Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia (kesehatan dan perawatan, kunjungan, informasi
3. Warga binaan pemasyarakatan produktif menuju manusia mandiri yang berdayaguna

4. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga
5. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia Dimana Sistem Pemasyarakatan berfungsi sebagai agen dalam pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia, menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, menjadi warga binaan pemasyarakatan produktif menuju manusia mandiri yang berdaya guna. Untuk mewujudkan pelaksanaan system pemasyarakatan yang sesuai dengan keputusan Kementerian Hukum Dan HAM, upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Semarang ini dengan melaksanakan program bimbingan kerja.

Peneliti berkonsentrasi pada program bimbingan kerja dalam pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi narapidana, kegiatan kemandirian tersebut mencakup beberapa progra pelaksanaan program bimbingan kerja dalam pemberdayaan narapidana di Lemabaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang ketrampilan yang di berdayakan berupa: Pelatihan daur ulang sampah, sulam benang, budidaya lele, pembuatan cairan kebersihan, pembuatan hydroponic, menjahit, pembuatan souvenir dan pelatihan pembuatan kue batik, sablon, membatik, menjahit, dress painting. Berikut ini beberapa contoh gambar pelatihan kerja:

Gambar 1.1
Pelatihan Kerja



Contoh dari gambar pelatihan di atas merupakan bentuk pelatihan budidaya lele dan menjahit. Kemudian program pembinaan kepribadian ini meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa, pembinaan Intelektual, pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang berpekara narkoba, Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Berikut contoh kegiatan pembinaan kepribadian :

Gambar 1.2
Kegiatan Keagamaan Pengajian dan Perayaan Hari Natal



Gambar diatas merupakan salah satu contoh kegiatan pembinaan kepribadian. Dimana petugas memfasilitasi warga binaan dalam melaksanakan ibadah sesuai keyakinan.

Dapat dilihat bahwa pemberdayaan dalam bimbingan kerja terhadap narapidana sudah berjalan dimana berpedoman pada Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan dalam Metode Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian. Dalam pembinaan kepribadian ini warga binaan dilatih agar lebih dekat dengan Tuhan dan dapat berperilaku dengan baik agar menyadari kesalahannya dan pada pembinaan kemandirian dengan jumlah warga binaan yang selalu berubah-ubah, tidak mengurangi kualitas produksi yang dihasilkan, dimana produk yang dihasilkan dapat menarik minat pembeli dan mampu untuk bersaing dengan produsen yang ahli pada dibidangnya. Berbagai bimbingan kerja dalam pemberdayaan patut untuk diberikan apresiasi dimana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Semarang. Proses pelaksanaan implementasi dari program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang, usaha untuk mewujudkan pembinaan dan bimbingan yang baik di perlukannya fasilitator yang membantu dalam proses

pemberdayaan bagi narapidana. Fasilitator adalah seseorang atau kelompok yang membantu individu atau sekelompok individu memahami tujuan bersama dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi, Peran utama seorang fasilitator adalah menjadi pemandu proses dalam berpartisipasi. Adapun Pihak ketiga yang bekerjasama dalam program pembimbingan narapida Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

Tabel 1.2

Sektor Pemerintah dan Swasta yang Bekerja Sama Dengan Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Semarang

No	Nama sector	Bidang	Keterangan
1.	Yayasan Syahidin	Asimulasi Sosial	Penyuluhan tentang bagaimana melakukan sosialisasi dengan baik dalam masyarakat dan sekitarnya.
2.	Yayasan Terang Bangsa	Kejar Paket A, B, C	Melakukan sosialisasi akan pentingnya pendidikan dan Menyediakan fasilitas terhadap narapidana untuk melanjutkan pendidikan dalam kejar paket.
3.	Bank Sampah	Bimbingan Ketrampilan	Melakukan pembimbingan ketrampilan dalam mengolah sampah seperti pembuatan tas, dompet, fas bunga dan yang lianya.
4.	Dermawan	Bimbingan Ketrampilan	Melakukan pembimbingan tentang berbagai macam ketrampilan dan pemasarnya salah satunya budidaya lele dan mengolahnya menjadi abon agar dapat di distribusikan.

5.	Rumah Flores	Bimbingan Ketrampilan	Melakukan pembimbingan dalam karya seni menyulam, merangkai bunga, pembuatan tanaman hias dan pembuatan dsain bermotif.
6.	Anne Afantie	Bimbingan Ketrampilan	Melakukan pembimbingan dalam menjahit dan dress painting dan pembuatan boneka
7.	BNI	Bimbingan Ketrampilan	Melakukan pembimbingan dalam berbagai hal baik dalam ketrampilan maupun dalah keahlian, contohnya membatik, hydro ponik dan yang lainnya.

Sumber; Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Kota Semarang

Tabel diatas menunjukkan peran fasilitator sangat berpengaruh pada proses pemberdayaan, selain sebagai agen dalam pelatihan bimbingan ketrampilan terhadap Narapidana, fasilitator juga membantu petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam proses pembekalan hingga menyediakan alat dan bahan bagi didalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan Program bimbingan kerja dapat berjalan dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, dimana dapat dilihat dari prestasi yang telah di dapatkan oleh pihak Lapas diantaranya:

1. Mendapat penghargaan sebagai penataan tata ruang terbaik dalam bimbingan kerja oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah,
2. Mendapatkan kesempatan dalam mengadakan Pameran batik di Bandara Soekarno Hatta Tangerang,

3. Mendapatkan Apresiasi dari Pemerintah Daerah sebagai Lapas yang memiliki UKM inovatif dan baik
4. Secara keseluruhan keberhasilan Lembaga pemasyarakatan Kota ini dimana dari data Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tahun 2015 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, menjadi LAPAS terbaik di seluruh wilayah Jawa Tengah dimana pada system pengoprasionalnya termasuk pada Zona Integritas yang sudah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pencapaian yang dilakukan untuk menuju wilayah bebas korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar program tersebut :

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penataan Tatalaksana
- c. Penataan Sistem Manajemen SDM
- d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- e. Penguatan Pengawasan
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Beberapa kriteria terhadap penentu keberhasilan program kerja di Lembaga Pemasyarakatan, dimana Lembaga Pemasyarakatan Wanita Semarang ini telah berhasil

menjalakan proses pemasyarakatan berdasarkan ketentuan yang ada. Dengan adanya keberhasilan pemberdayaan di atas menarik para Lembaga Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di berbagai wilayah di Indonesia, untuk melakukan studi banding dan studi tiru terhadap Pemberdayaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, tidak terkecuali dalam bidang ketrampilan kerja. Berikut daftar nama Lembaga Pemasyarakatan dan Kanwil yang melakukan studi banding dan studi tiru diantaranya:

Tabel 1.3

Daftar Nama Lembaga Pemasyarakatan dan Kanwil yang melakukan studi banding dan studi tiru

No	Daftar Lembaga Pemasyarakatan	Daftar Kantor Wilayah
1.	Lembaga Pemasyarakatan Kalimantan Utara	Kantor Wilayah Sumatera Utara
2.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Nusa Kambangan	Kantor Wilayah Maluku
3.	Lembaga Pemasyarakatan Magelang	Kantor Wilayah Palu

Sumber; Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Kota Semarang

Pelaksanaan studi banding dan studi tiru ini untuk maksud peningkatan mutu, perluasan usaha, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundangan, Selain itu membandingkan kondisi obyek studi di tempat lain dengan kondisi yang ada di tempat sendiri. Hasilnya berupa pengumpul data dan informasi sebagai bahan acuan dalam perumusan konsep yang diinginkan, dimana berbagai

Lembaga Pemasyarakatan dan Kantor wilayah di atas mulai menerapkan bimbingan kerja bagi warga binaanya dengan melihat keberhasilan dari Pemberdayaan narapidana di Lapas Wanita Kelas IIA Bulu Kota Semarang.

Pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bulu Kota Semarang, berfokus pada bimbingan kerja, yang bertujuan untuk mengatur dan melakukan pembinaan terhadap narapidana untuk memperoleh perubahan yang lebih baik dan bermanfaat. Keberhasilan pemberdayaan dapat disamakan proses pelaksanaannya, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, telah memperoleh keberhasilan di dalam pemberdayaannya yang lebih bersifat mengayomi. Keberhasilan dalam pemberdayaan ini dapat dilihat dari hasil bimbingan kerja yang telah menciptakan produk yang diminati oleh masyarakat, hal itu disebabkan dari petugas pelaksana memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam melakukan pekerjaannya, hal ini di peroleh dari pihak Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah yang memberikan pelatihan dan pembekalan secara bertahap kepada petugas lembaga Pemasyarakatan agar sesuai dengan kebutuhan narapidana dan perkembangan zaman sehingga dapat terciptanya tata laksana yang baik dari aspek kinerja petugas dengan mempersiapkan narapidana menjadi manusia mandiri dan produktif agar dapat dimanfaatkan setelah mereka berada ditengah-tengah masyarakat. . Pelaksanaan program bimbingan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan dalam Metode Pembinaan. Program

pemberdayaan dilihat dari pola pembinaan yang meliputi 2 pembinaan yaitu: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Melalui penelitian ini, penulis akan menganalisis pelaksanaan program bimbingan kerja dalam pembinaan kepribadian dan kemandirian dengan judul “ IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN KERJA DALAM PEMBERDAYAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan melalui bimbingan kerja bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi program pemberdayaan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan program pemberdayaan melalui bimbingan kerja dan melihat Implementasi program bimbingan kerja terhadap pengembangan ketrampilan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulu Kota Semarang

2. Menganalisis faktor apa yang mempengaruhi dalam keberhasilan program pemberdayaan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulu Kota Semarang

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan untuk mengkaji kembali bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulu Kota Semarang terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan penambah wawasan dan pengetahuan
2. Sumber informasi bagi penelitian lebih lanjut dalam pembahasan yang sama

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Pengertian Administrasi Publik

Menurut Prajudi Atmosudirjo, Syafiie, Inu Kencana (2006:13), administrasi adalah suatu fenomena social, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat moderen. Eksistensi dari pada administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat di dalam suatu organisasi.

Menurut Herbert A. Simon , Syafiie, Inu Kencana (2006:13), administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Menurut Leonard D. White Syafiie, Inu Kencana (2006:13), administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

Menurut Gulick, Syafiie, Inu Kencana (2006:14), administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut The Liang Gie, Syafiie, Inu Kencana (2006:14), administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Sondang P. Siagian Syafiie, Inu Kencana (2006:14), administrasi adalah keseluruhan proses pelaksana dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksana itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Syafiie, Inu Kencana (2006:18), istilah publik berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat atau negara. Arti dari *public* itu sendiri sebagai berikut:

Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, tindakan yang benar, dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. *Public* dalam kesempatan ini tidak langsung diartikan sebagai penduduk, masyarakat, warga negara, ataupun rakyat karna kata-kata tersebut berbeda. Penduduk adalah

sejumlah orang yang hanya sekedar penghuni dari suatu negara tertentu. Masyarakat adalah sejumlah orang yang bersama-sama menjadi anggota suatu negara, yang harus dibina dan dilayani oleh administrasi publik setempat. Warga negara adalah sejumlah orang yang dinyatakan sebagai warga negara oleh suatu negara tertentu, berdasarkan peraturan perundang-undangan negara tersebut. Rakyat adalah sejumlah orang yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam masyarakat negara, sebagai penghargaan pada eksistensi dan kemerdekaan hak asasinya. Rakyat inilah yang menjadi salah satu syarat keberadaan negara.

Menurut Pfiffner dan Presthus, Syafiie, Inu Kencana (2006:23) administrasi publik adalah sebagai berikut:

1. Administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Administrasi publik dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama pemerintah.
3. Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Menurut Nigro bersaudara Syafiie, Inu Kencana (2006:24) administrasi public diartikan sebagai beberapa hal berikut:

1. Administrasi publik adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintah
2. Administrasi publik meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, yudikatif serta hubungan di antara mereka.
3. Administrasi publik sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Administrasi publik memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karena merupakan sebagian dari proses politik.
5. Administrasi publik dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dan administrasi perseorangan.

Menurut Prajudi Atmosudirjo Syafiie, Inu Kencana (2006:24), administrasi publik adalah administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Menurut Arifin, Syafiie, Inu Kencana (2006:25) administrasi public adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik Negara.

Menurut Dwight Waldo, Syafiie, Inu Kencana (2006:25) administrasi public adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatanya guna mencapai tujuan pemerintah.

Menurut George J. Gardon , Syafiie, Inu Kencana (2006:25) administrasi public dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif dan peradilan.

Menurut Chandler dan Plano (dalam Keban,2014:29-30) Administrasi Publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Sementara itu, Henry dalam Harbani Pasolong (2008: 8), mengemukakan bahwa:

“ Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.”

Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Sedangkan Waldo dalam Pasolong (2008: 8) mendefinisikan “ Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.”Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pengertian tentang administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik.

Menurut Nigro dan Nigro (2014:5) Administrasi Publik merupakan usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif yang mempunyai peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik agar agar dapat memberi pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Nicholas Henry (2014:6) memberi batasan bahwa adminitrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosikan pemahaman tentang pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Dapat disimpulkan bahwa Adminitrasi Publik merupakan proses yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan organisasi publik yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, untuk tercapainya tujuan di perlukanya sebuah paradigma sebagai suatu cara pandang , nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan sesuatu masalah.

I.5.2 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah corak berfikir seseorang atau sekelompok orang. Karena ilmu pengetahuan itu sifatnya stabil, walau salah satu persyaratannya harus dapat diterima secara universal, namun dalam kurun waktu tertentu tetap memiliki perubahan, termasuk ilmu-ilmu eksata sekalipun.

Menurut Thomas S. Khun , Syafiie, Inu Kencana (2006:26) mengatakan bahwa paradigam adalah suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu.

Menurut Nicholas Henry, Syafiie, Inu Kencana (2006:27) memilih bahwa ada lima kelompok corak berfikir para pakar tentang keberadaan Ilmu Administrasi Publik yaitu sebagai berikut:

1. Paradigma dikotomi antara politik dan administrasi publik, tokoh-tokohnya Frank J. Goodnow dan Leonard D White.
2. Paradigma prinsip-prinsip administrasi, tokoh-tokohnya W.F Willoughby, L. Gullick dan L Urwick.
3. Paradigma kelembagaan, tokoh-tokohnya adalah Charles E. Lindblom, James D. Thomson, Frederick C. Mosher dan Amitai Etzioni.
4. Paradigma hubungan kemanusiaan, tokoh-tokohnya adalah Rensis Likert, Daniel Katz, dan Robert Kahn.

5. Paradigma pilihan masyarakat umum, tokohnya adalah Vincent, Ostrom, James Buchana, dan Gordon Tullock.

Paradigma administrasi berarti pandangan tentang administrasi. Paradigma administrasi berkembang sesuai dengan perkembangan manusia. Istilah paradigma dalam administrasi menurut Robert T. Golembiewski (Thoha 18 : 2008) hanya dapat dimengerti dalam hubungannya dengan istilah lokus dan fokusnya. Sehingga paradigma administrasi mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks dapat dimengerti. Namun secara ilmiah, perkembangan administrasi dimulai ditahun 1900 yang hingga saat ini telah melewati lima jenis paradigma antara lain :

1. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Goodnow dalam Keban mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedang administrasi memberi perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut. Pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresi kehendak rakyat, dengan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak rakyat.

2. Prinsip-prinsip administrasi (1927-1937)

Paradigma ini diusung oleh Willoughby yang menyatakan bahwa prinsip administrasi adalah prinsip administrasi, dalam artian bukan prinsip ilmu lain (Nawawi 105:2009). Paradigma ini lebih menekankan fokusnya pada prinsip-prinsip

administrasi yaitu POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting and Budgeting) dari pada lokusnya yang dianggap bisa berlaku universal.

3. Administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970)

Paradigma ini merupakan kritikan dari paradigma sebelumnya yang menolak prinsip administrasi yang universal. Asumsi utama yang dibangun adalah administrasi negara bukanlah sesuatu yang bebas nilai yang dapat berlaku dimana saja. Namun administrasi negara tentu dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu. Pada titik ini terjadi persinggungan antara nilai administrasi negara di satu sisi dan nilai politik disisi lain. Akhirnya John Gaus dalam Keban (33:2008) secara tegas mengatakan bahwa teori administrasi publik sebenarnya juga teori politik

4. Administrasi negara (1956-1970)

Paradigma ini mencoba untuk mengkaji kembali secara ilmiah dan mendalam, prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya. Menurut James D. Thompson dalam Ismail Nawawi (104:2009) bahwa dalam melaksanakan pengaturan dan keteraturan negara diperlukan ilmu dan teknologi administrasi sebagai sarana berpikir dan bertindak sehingga tugas-tugas kenegaraan dapat membuahkan hasil yang memuaskan semua pihak. Adapun fokus dari paradigma ini adalah perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern, analisis sistem dan sebagainya.

5. Administrasi negara sebagai administrasi negara (1970-sekarang)

Paradigma ini memiliki fokus dan lokus yang jelas yaitu berfokus pada teori administrasi, teori manajemen dan kebijakan publik. Sedang lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan publik. Paradigma ini dikemukakan oleh Nicholas Henry.

Dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan proses yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan organisasi publik. Administrasi public memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan pemerintah karena, merupakan sebagai dari proses politik. Administrasi publik merupakan usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik yudikatif, legislative, eksekutif yang mempunyai peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik agar dapat memberi layanan kepada masyarakat, kebijakan publik ini sebagai suatu tindakan atau pilihan yang dilakukan baik oleh lembaga pemerintah maupun bada-badan lainnya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, yang memiliki tujuan untuk mengambil keputusan agar tercapainya kebutuhan publik yang secara afektif dan efisien untu kebaikan bersama.

I.5.3 Pengertian Kebijakan Publik

Dalam hal ini penulis berfokus pada kebijakan publik. Kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Kebijakan public dalam arti luas dapat di bagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dan peraturan yang tidak tertulis disepakati yaitu disebut konvensi-konvensi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakn public tertinggi dibuat legislative dan ini bearti mengikuti prinsip dasar dari teori Politik Trias Politica yang diajarkan oleh montenesquieu pada abad 17 pencerahan di Prancis. Adanya jenis-jenis kebijakan, yang pertama adalah kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang diberikan pada pembatasan-pembatasan. Yang kedua adalah kebijakan alokatif dan distributive (Nugroho 2004:59)

Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. (Winarno, 2007: 30). Berikut penjelasan dari tahap-tahap kebijakan (Winarno, 2007: 32-34):

1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda public. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

2. Tahap Reformasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakn kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut dari berbagai alternative atau kebijakan (policy) Alternative atau Policy options yang ada.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut di adopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, konsesnsus antar lembaga atau putusan peradilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Keputusan program kebijakan yang telah di ambil sebagai alternative pemecahan masalah harus di implementasi, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah di ambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya fianancial dan manusia.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan di nilai atau di evaluasi, untuk melihat sejauhmana kebijakan yang di buat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan public pada dasarnya dibuat untuk merah dampak yang inginkan.

Dengan demikian kebijakan publik sangat berperan penting sebagai suatu kebijakan yang diambil untuk kebaikan bersama baik dalam masyarakat maupun Pemerintah. Kebijakan publik ini juga sebagai alternative pemecahan masalah harus dilakukan dengan tepat agar masyarakat mendapatkan pelayanan dan berdayaan untuk

kehidupan yang lebih tertaa, oleh itu di perlukaanya suatu implementasi yang baik sebagai suatu cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

1.5.4 Teori Implementasi

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik mampu dibuat pemerintah, kemudian tidak mempunyai pengaruh dalam kehidupan Negara karena tidak dilaksanakan . menurut Gordon dalam Pasolong (208:58) dalam buku Dedy Mulyadi (2016:30) Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang diseleksi. Mengorganisir bearti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program dalam rencana dan petunjuk yang dapat diterima.

Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas untuk melaksanakan program.

Implementasi menurut teori Jones (1987): “ *Thoses Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Van Horn dan Van Meter (1975):” *Thoses action by public and private individual (or grup) that are the achievement or objectives set forth in prior policy* (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, sedangkan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri. Dalam proses implementasi sebuah kebijakan akan melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi *street level bureaucray (lipsky)* untuk memberikan layanan atau mengatur perilaku target group.” dalam buku Dedy Mulyadi (2016:345)”

Tahap implementasi kebijakan dapat dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan menyampaikan aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan disisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternative kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan kongkret atau mikro.

Pengertian Implementasi menurut Grindle (1980;7) dalam buku Dedy Mulyadi (2016:47) menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administrative dapat di teliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van meter dan Van Horn (Wibawa, dkk 1994:15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan

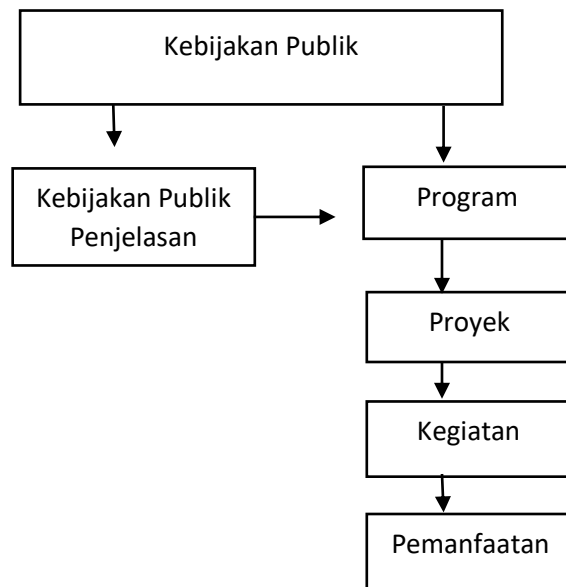
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksud untuk mencapai tujuan. Grindle (1980:7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Keberhasilan kebijakan atau program dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksana yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program bias saja berhasil dilihat dari sudut proses, akan tetapi bias saja gagal jika ditinjau dari dampak yang dihasilkan.

Menurut Wahyu Nurharjadinom dalam buku Dedy Mulyadi (2016:350), studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksana kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksana telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi. Sedangkan kejelasan makna implementasi kebijakan menurut Rian Nugroho (2012) dalam buku Dedy Mulyadi (2016:51) pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Kurang

lebihnya untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan public, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakn public tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.4
Implementasi Kebijakan



Sumber: Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: Media Pressindo

Keberhasilan kebijakan suatu program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara

pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dilihat berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan.

1.5.4.1 Model-model Implementasi Kebijakan Publik dalam buku Dedy Mulyadi (2016:66-)

A. Model Merilee S. Grindle (1980)

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Nugroho (2006:634) di pengaruhi oleh kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (content of implementation). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuatan kebijakan
5. Siapa pelaksana program
6. Sumber daya yang dikerahkan

Sedangkan lingkungan kebijakan (content of implementation) mencakup:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga penguasa
3. Kepentingan dan daya tanggap

Jika dilihat model Grindle ini bahwa keunikan terletak pada pemahamannya yang komperhensif akan akan konteks kebijakan, khususnya yang mencakup dengan implementor, penerima implementasi dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para actor implementasi, serta kondisi-kondisi sumberdaya implementasi yang di perlukan.

B. Model Mazmanian dan Sabatier (1983)

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni

1. Karakteristik dari masalah, (tractability of the problems), indikatornya:
 - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
 - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
 - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
 - d. Cakupan perubahan yang perlu diharapkan

2. Karakteristik kebijakan atau undang-undangan (ability of statute to structure implementation), indikatornya:
 - a. Kejelasan isi kebijakan
 - b. Seberapa jauh kebijakn tersebut memiliki dukungan teoritis
 - c. Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut
 - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
 - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
 - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakaan.
3. Variable lingkungan (nonstatory variables affecting implementation), indikatornya:
 - a. Kondisi social ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
 - b. Dukungan public terhadap sebuah kebijakan
 - c. Sikap dari kelompok pemilih
 - d. Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan Implemtor

C. Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward III(1980).

Menunjukkan pada empat variable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Haedar, Akib, Antonius, Taringan, bahwa implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya adalah Implementation Problems Approach yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984;9-10). Edward III mengajukan pendekatan mengenai masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni (i) Faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. (ii) Faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan dua pertanyaan tersebut dirumuskan empat factor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumberdaya, sikap organisasi, atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat factor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

1. Komunikasi yaitu menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program kebijakan dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan dengan baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

2. Sumber daya yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.

Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementer yang dapat melingkupi suatu kelompok sasaran . sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program atau kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan . sebab tanpa implementor kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat . sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai , program tidak dapat berjalan dengan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Disposisi yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan atau program . karakter yang paling penting dimiliki implementor adalah kejujuran , komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam guideline program/kebijakan. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dalam program kebijakan.

4. Struktur Birokrasi, menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting; pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedure (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka yang kerja yang jelas sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal berbelit-belit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin program secara cepat dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari "firus veberian" yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis.

D. Model Donalds S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

1. Standard dan Sasaran Kebijakan

Standar dan Sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen implementasi.

2. Sumber Daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

4. Karakteristik agen pelaksana

Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak kemudian juga bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

5. Kondisi social, ekonomi, politik

Kondisi social, ekonomi, politik mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

6. Disposisi Implementor

- a. Respon implemetor dalam kebijakan yang akan mempengaruhi kemauanya untuk melaksanakan kebijakan
- b. Kognisi, yakni pemahamanya terhadap kebijakan
- c. Intensiatas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses penting dalam pelaksanaanya suatu kebijakan, ketepatan dalam proses implementasi ini menjadi kriteria pelaksanaan untuk melihat keberhasilan dari sebuah proses implementasi itu sendiri agar berjalan dengan baik sesuai struktur yang direncanakan dan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi tersebut dan dalam implementasi program bimbingan kerja dalam pemberdayaan narapidana di Lapas Perempuan Semarang ini peneliti berpedoman berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M. 02 PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan nerapidana.

1.5.5 Pemberdayaan

Menurut Dhal (1963) dalam buku Totok (2017:34) pemberdayaan yang berasal dari kata *empowerment*. Sangat berkaitan dengan kekuatan atau kekuasaan. Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkata “kekuatan” atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain, dalam hubungan ini pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai pembagian kekuasaan yang adil (Paul,1987) agar yang lemah

memiliki kesadaran berpolitik serta dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan .

Dalam perspektif lingkungan, pemberdayaan dimaksudkan agar setiap individu memiliki kesadaran, kemampuan, dan kepedulian untuk mengamankan dan melestarikan sumberdaya dan pengelolaannya secara berkelanjutan.

Sumodiningrat (1999) dalam buku Totok (2017:52-53) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut

penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya (Kartasasmita, 1996).

Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya, menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggung jawaban, dan nilai-nilai yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri.

Menurut Totok (2017:61-62). Pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk pemberdayaan yang merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakat dalam arti luas).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat terutama mereka yang miskin sumberdaya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Dalam proses ini, LSM berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat.

Tim Deliveri (2004) pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dengan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan ini kemudian menjadi basis program daerah, regional dan bahkan program nasional

Pemahaman menunjukkan bahwa program pembentukan pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai fasilitator. Penerima manfaat program pemberdayaan masyarakat adalah kelompok-kelompok marjinal dalam masyarakat, termasuk wanita, namun demikian, ini tidak berarti menafikan partisipasi pihak-pihak lain dalam kegiatan pemberdayaan

Aspek Penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah : program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya.

Menurut Ambar Teguh Sulisty (2004:80) tujuan pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfiki, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

Lebih lanjut akan ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang di pandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif dengan pengarahan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Dengan demikian untuk menjadi mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumberdaya yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif dan sumberdaya lainnya yang bersifat fisik material.

Adannya beberapa tahap-tahap pemberdayaan yang harus dilalui untuk mencapai kemandirian yang merupakan proses kebangkitan kembali dan pengembangan kekuatan pada diri setiap masyarakat sendiri, tahap-tahap itu sebagai berikut:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan prilaku menuju prilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat pengambil peran dalam pembangunan.

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Pada tahap ini pihak pemberdaya/ actor/ pelaku pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang ditervensi dalam masyarakat lebih pada kemampuan efektif-nya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan.

Pada tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan dapat berlangsung baik, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan kecakapan-ketrampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang akan menjadi tuntunan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan-ketrampilan dasar yang mereka butuhkan.

Tahap ketiga merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-ketrampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan dapat ditandai kemampuan masyarakat didalam membentuk inisiatif, kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi didalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep

pembangunan masyarakat pada kondisi seperti ini seringkali didudukkan sebagai subyek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitator saja.

Menurut Ife (1999), Suharto Edi (2009:59-60), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas :

- Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan social, pendidikan, kesehatan.
- Sumber-sumber: kemampuan mebolisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.

- Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang dan jasa.
- Reproduksi: kemampuan dalam kaitanya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social yaitu: masyarakat, yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun social, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupanya.

Menurut Kieffer (1981) dalam Suharto Edi (2009:63), pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi: kompetensi kerakyatan, kemampual social politik, dan kompetensi partisipatif. Parson et.al.(1994:106) dalam Suharto Edi (2009:63) jug mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

- Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individu yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan social yang lebih besar.
- Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, beguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.

- Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan social, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Djohani dalam buku Anwas (2013:49) : "Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya dan kekuasaan kepada pihak yang lemah (potterles), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerful) sehingga terjadi keseimbangan". Pendapat di atas mengemukakan bahwasannya pemberdayaan merupakan pada aspek pendelegasian kekuasaan atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat yang lemah sehingga individu atau masyarakat tersebut mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuannya yang tujuannya akhirnya mampu mewujudkan keseimbangan kekuasaan antara individu atau masyarakat yang lemah dengan individu atau masyarakat yang terlalu berkuasa. Pendapat di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Rappaport dalam buku Anwas (2013:49) yang menyatakan : "Pemberdayaan adalah suatu cara dengan masyarakat organisasi, dan komunitas diserahkan agar mampu mengatur kehidupannya".

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan wewenang atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu kelompok atau masyarakat sehingga mampu berdaya,

memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri. Sebagaimana yang dikemukakan Parsons dalam Anwas (2013:49):".

Selanjutnya menurut Ite dalam Anwas (2013:49) menyatakan : "Pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri".

Dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif.

Tabel 1.5

Penelitian Terdahulu

1.5.7 Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Anang Sugeng Cahyono, (2014)	Pemberdayaan dan Pengembangan Ketrampilan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulung Agung	Proses Pemberdayaan dan Pengembangan Ketrampilan Warga Binaan di LP Kelas II Tujuan besar dari upaya ini adalah menciptakan sumberdaya manusia baru yang mampu adaptif melalui jalur kewirausahaan., namun masih adanya faktor yang menjadi hambatan Tulungagung diantaranya: 1).Keterbatasan modal dan anggaran untuk dapat mengembangkan program keterampilan warga binaan; 2).Kurangunya Sumber Daya Manusia khususnya petugas di bagian Biker di LP Kelas IIB Tulungagung sehingga pembinaan dan pengawasan tidak optimal.

Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Anang Sugeng Cahyono, (2014) untuk melihat gambaran pelatihan ketrampilan kerja dan lebih menekankan pada kewirusahaan di Lembaga Pemasyarakatan, namun masih adanya dimana masih adanya factor penghambat dalam pemberdayaan, sedangkan penulis berfokus pada best prektif dimana factor pendorong keberhasilan dan proses program pembemberdayaan.

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitia
----------------	------------------	-----------------

Habibi, Hanafi, Hadi (2015)	Peran Negara Dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita	Hasil penelitian ini adalah Peran Negara dalam implementasi program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang dapat berjalan dengan baik karena petugas bekerjasama dengan narapidana yang disebut tamping.
-----------------------------	---	---

Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Habibi, Hanafi, Hadi (2015), lebih berfokus pada peran Negara dalam pembinaan terhadap narapidana, sedangkan penulis di dalam penelitian melibatkan sector swsta yang ikut andil di dalam proses pemberdayaan.

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
----------------	------------------	------------------

Hamja , (2015)	Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat Dalam System Peradilan Pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narapidana harus memiliki kesempatan dalam memperoleh pekerjaan. 2. Narapidana harus diseleksi terlebih dahulu. 3. Narapidana tidak boleh di eksploitasi 4. Keberhasilan proses pembinaan narapidana ditentukan oleh beberapa aspek antara lain: petugas lapas dan aspek masyarakat, dalam memberdayakan lapas Terbuka diperlukan peran masyarakat dan pihak swasta untuk meyakinkan dan memberi kesempatan bahwa narapidana berhak ikut ndil dalam masyarakat dan bekerja.
----------------	--	---

Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Hamja , (2015) lebih menekankan terhadap konsep pidana yang akan dilakukan, dimana tentang peraturan-peraturan yang telah di tetapkan, sedangkan penulis lebih memperlihatkan bagaimana narapidana dapat mengembangkan kemampuan atau potensi melalui bimbingan ketrampilan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat mengembangkan diri terhadap tuntutan ekonomi dalam lingkungan masyarakat.

Nama dan Tahun	Judul penelitian	Hasil Penelitian
----------------	------------------	------------------

Angga Karyono, Tahun: 2017	Pemberdayaan Narapidana Perempuan dalam Bidang Ketrampilan Kerja di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Tanjung Pinang	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan di lembaga Masyarakat Kelas IIA Tanjung Pinang telah berjalan namun belum optimal. masih adanya kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan didalam lapas. Kendala-kendala tersebut diantaranya minimnya bimbingan kerja yang diselenggarakan lapas, tempat pemasaran hasil karya yang terbatas, minimnya anggaran, kurangnya pegawai, jumlah narapidana perempuan yang tidak seimbang dengan jumlah pemberdayaan masih adanya pelatihan keterampilan yang tidak diberdayakan, dan kurangnya koordinasi dengan dinas/stakeholder. Terkait pembinaan lanjutan
----------------------------	---	--

Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Angga Karyono, Tahun: 2015 di Lembaga Tanjung Pinang memperlihatkan bahwa proses pemberdayaan kerja masih dikatakan kurang baik, tidak adanya peran swasta dalam proses pemberdayaanya, sedangkan penulis lebih memperhatikan keberhasilan program pemberdayaan dukung peran swasta sebagai fasilitator pemberdayaan

I.6 Fenomena Penelitian

Dalam penelitian kali ini peneliti berfokus terhadap bimbingan kerja terhadap narapidana. Secara Yuridis untuk melihat keberhasilan implementasi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Kota Semarang untuk melihat keberhasilan program yang ada peneliti melihat dan berpacu berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan dalam Metode Pembinaan. Maka dalam fenomena penelitian ini menggunakan pola pembinaan yang meliputi 2 pembinaan yaitu: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian diantaranya:

1. Pembinaan Kepribadian
 - a. Pembinaan kesadaran beragama meliputi kegiatan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan mengadakan upacara Kesadaran Nasional dilaksanakan setiap tanggal 17 setiap bulan
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
 - Kursus dan latihan ketrampilan
 - Perpustakaan
 - Memperoleh informasi dari luar melalui majalah, radio, televisi
 - Kejar paket A
 - d. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berpekerja narkoba antara lain:

- Penyuluhan setiap bulan bekerjasama dengan Yayasan Wahana Bakti Sejahtera Semarang dan YAKITA
- e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01. PK. 04-10 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang syarat-syarat Assimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Mengunjungi Keluarga.
 - Assimilasi : Kerja bakti diluar tembok LP
 - Integrasi : Memberikan kesempatan untuk pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian berfokus pada ketrampilan kerja diantaranya:

- a. Pelatihan daur ulang sampah
- b. sulam benang
- c. budidaya lele
- d. pembuatan cairan kebersihan
- e. pembuatan hydroponic
- f. Menjahit
- g. pembuatan souvenir
- h. memasak
- i. sablon

j. Membatik

Dua Program Pembinaan terhadap narapidana ini adalah suatu bentuk proses rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, untuk mempunyai pengetahuan dan kemampuan bagi narapidana dalam memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun social, dan mandiri dalam melaksanakan aktivitas dilingkungan masyarakat. Untuk memperoleh perubahan yang lebih baik dan bermanfaat.

Berdasarkan fenomena Penelitian ini implementasi Program Bimbingan Kerja dalam pemberdayaan narapidana berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan dalam Metode Pembinaan. Program tersebut memiliki tujuan bagi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bulu Kota Semarang untuk menjadikan narapidana lebih produktif menuju manusia mandiri yang berdaya guna. Semua kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, dimana factor penyebab keberhasilan telah di rumuskan dan akan di temukan pada pembahasan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Pada Penelitian ini desain penelitian yang akan di gunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan serta menjabarkan fenomena, mengenai apa yang terjadi dan mengapa dapat terjadi dan bagaimana terjadinya. Penelitian di lakukan dengan pengamatan secara empirik untuk menemukan sebuah permasalahan yang maupun sebuah keberhasilan.

Penelitian Kualitatif menekankan data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, angka-angka, angka ini sifatnya sebagai penunjang jika di perlukan. Tujuan dari Penelitian kualitatif menurut (Moleong:2010:11) tidak selalu mencari sebab-akibat sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu, mencoba menerobos mendalami gejala dengan menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana di sajikan oleh situasinya. Selain itu menurut (Widodo: 2000:15) Penelitian yang menggunakan tipe deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya pada objek penelitian saat penelitian di laksanakan.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan segala sesuatu baik kejadian, kenampakan dan sebagainya yang terjadi pada proses bimbingan kerja di Lemabaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

1.7.2 Situs Penelitian

Situs Penelitian ini menentukan dimana penelitian itu akan di lakukan. Penelitian ini di lakukan di Lemabaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dengan fokus pada program bimbingan kerja terhadap pemberdayaan narapidana. Lokasi penelitian terletak di Jl. MGR Soegiyopranoto no 59 Bulu Kota Semarang.

1.7.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini membutuhkan beberapa narasumber yang di sebut sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian atau bisa di sebut dengan informan adalah orang yang dapat memberikan informasi. Dalam pengertian lain informan dapat dikatakan sebagai responden. Teknik peneliti informan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah purposive sampling, artinya pengambilan dengan sengaja untuk memperoleh informan yaitu orang-orang yang mengetahui dengan benar atau yang terpercaya, sedangkan untuk memperoleh data kualitatif peneliti menggabungkan dengan menggunakan teknik snowballing dimana pertama penulis menentukan satu orang untuk dijadikan informan. Kemudian orang tersebut akan menunjukan orang lain untuk kita

jadikan informan. Berkelanjutan sampai data atau informasi untuk di peroleh dirasa sudah cukup untuk meneliti.

Pemilihan informan dilakukan kepada orag-orang yang terlibat langsung dan mengetahui tentang pemberdayaan narapidana di bidang bimbingan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bulu Kota Semarang. Informan ini dijadikan sumber penelitian ini adalah narasumber yang berasal dari petugas Lapas. Berdasarkan pertimbangan untuk memilih informan, maka dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah:

1. Warga Binaan
2. Kepala Sub Pemberdayaan Narapidana
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang

1.7.4 Jenis Data

Penelitian Kualitatif ini, yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri, jenis data yang di ungkapkan pada penelitian ini bersifat skematik, narasi, dan uraian juga penjelasan data dari informan baik lisan maupun dokumen tertulis, aktivitas subjek yang di amati di lapangan juga menjadi data dalam pengumpulan hasil penelitian ini.

1.7.5 Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya. Di dalam hal ini, peneliti sebagai pengumpulan data primer yang menggunakan panduan wawancara. Data primer didapat dari wawancara terhadap warga binaan dan petugas Lapas serta observasi lapangan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bulu Kota Semarang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder ini dapat diperoleh dari dokumen, buku, data statistik, laporan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini dan data-data yang telah diolah mengenai program pemberdayaan di Lapas.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam tiga langkah (Sugiyono: 2010: 137) diantaranya:

1. *Getting in* : Merupakan proses memasuki lokasi penelitian.
2. *Getting along* : Merupakan proses berada di lokasi penelitian, dimana dalam lokasi penelitian tersebut peneliti berusaha menjalin kepercayaan dengan informan pada saat berada di lokasi penelitian, agar informan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
3. *Logging the data* : Proses mengumpulkan data informasi

a. Wawancara mendalam (*Depth Interview*)

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui percakapan-percakapan dengan behadapan yang akan memberikan keterangan asli terhadap peneliti, teknik wawancara yang di lakukan peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada warga binaan sebagai aktor dalam program bimbingan kerja dan petugas sub bagian bimbingan kerja sebagai pelaksana kegiatan.

b. Observasi

Merupakan upaya pengamatan langsung terhadap objek peneliti untuk memperkuat dan meyakinkan hasil wawancara dan fenomena selama proses *getting along*.

c. Dokumentasi

Mencari dokumen berupa artikel di Koran, foto, dan laporan yang sesuai dengan keadaan

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis domain yang pada hakikatnya adalah upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian, teknik analisis domain dipakai dalam penelitian yang

tujuannya adalah eksplorasi. Maksudnya hasil penelitian tersebut untuk mendapatkan gambaran selengkapnya seutuhnya dari suatu objek yang diteliti. Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2010-244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan yang akan di cerita kepada orang lain. Tujuan dari analisis data ini untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang perlu digunakan untuk mendapatkan informasi yang baru dan kesalahan apa yang harus diperbaiki. Interpretasi data merupakan pencarian pengertian yang lebih luas tentang penemuan-penemuan yang menjadi fokus penelitian. Interpretasi data memiliki dua aspek yaitu:

1. Untuk menegakan keseimbangan suatu penelitian, dalam arti menghubungkan hasil suatu penelitian dengan penemuan penelitiannya lainnya .
 2. Untuk membuat atau menghasilkan suatu konsep yang bersifat menerangkan
- Proses Analisis data kualitatif selama di lapangan menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moeleong, 2007: 248) dengan proses sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Hal ini dilakukan karena data yang didapat dari lapangan akan sangat banyak jumlahnya.

2. Penyajian Data

Data yang sudah di reduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat seperti grafik, tabel, diagram dan sejenisnya. Dengan cara seperti ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu menarik kesimpulan yang bersifat sementara karena pada suatu waktu dapat berubah jika di temukan bukti yang kuat untuk pengumpulan data berikutnya.

Ketiga langkah tersebut dapat dilakukan pada semua tahapan di dalam proses penelitian kualitatif, yaitu pada tahap deskripsi, fokus, dan seleksi. Tahapan-tahapan proses analisis diatas saling berkaitan. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan gambaran dan jawaban secara jelas kondisi lingkungan penelitian serta dapat menghasilkan kesimpulan penelitian.

1.7.8 Kualitas Data

Dalam menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul peneliti harus melakukan pengecekan data. Menurut Meleong dalam Afifudin dan Saebeni (2009:

155), pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) dengan teknik triangulasi, ketekunan, pengamatan, dan pengecekan .

Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang di dasarkan di luar data untuk keperluan mengecek atau membandingkan terhadap data yang telah ada. Triangulasi yang ada salah satunya adalah trainggulasi dengan sumber yaitu membandingkan data dengan hasil observasi, hasil aktivitas subjek penelitian, dan hasil wawancara terhadap subjek yang ditentukan terhadap penerapan metode.

Teknik Triangulasi yang lazim di gunakan ialah pemeriksaan melalui sumber yang lainnya. Trianggualsi dengan sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang di lakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui sumber data. Hal itu dapat dicapai dengan jalan (Moleong, 2007: 330-331).

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membndingkan apa yang dikatan orang didepan umum dengan apa yang dikatakanya secara pribadi
3. Membendingkan tentang apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian
4. Memandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan ,